



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT: STUDI ETNOGRAFI DI DESA NANGERANG, KABUPATEN SUKABUMI

Vivi Febrilian Azzira, Sulaeman, Iqbal Noor

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

vivifebrilian2208@gmail.com, sulaeman1342@gmail.com, iqnoor@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dari perspektif masyarakat Desa Nangerang, Kabupaten Sukabumi. Menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini menelaah bagaimana nilai budaya lokal seperti gotong royong dan legowo memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan telah dilakukan secara formal, namun belum diikuti dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara bermakna. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa masih bersifat simbolik, didorong oleh rasa hormat dan kepercayaan terhadap aparatur desa. Nilai sosial budaya berperan sebagai faktor pendukung sekaligus penghambat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan literasi anggaran dan pelibatan masyarakat secara substansial dalam proses pengambilan keputusan desa.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan keuangan Desa, Etnografi, Budaya Lokal

Abstract

This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency in village financial management from the perspective of Nangerang Village residents, Sukabumi Regency. Employing an ethnographic approach, it explores how local cultural values such as gotong royong (mutual cooperation) and legowo (sincere acceptance) shape community perceptions and participation in managing village funds. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that while financial reporting is formally conducted,

it is not accompanied by meaningful community engagement or understanding. Public participation remains symbolic, influenced by respect and trust toward village officials. Local culture acts as both an enabler and a barrier to fostering accountability and transparency. This study highlights the need to improve budget literacy and promote substantive community involvement in village governance.

Keywords: Public Sector Accounting, Accountability, Transparency, Village Financial Management, Ethnography, Local Culture

1. Pendahuluan

Kerangka pendahuluan dimulai dengan paparan latar belakang masalah: selama ini dana desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan lokal, namun laporan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Banyak warga merasa tidak diberi akses informasi yang memadai terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini mendorong rasa skeptis terhadap aparat desa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi lokal.

Tujuan penelitian dirumuskan untuk (1) memetakan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan pengalaman warga, (2) mengidentifikasi hambatan yang menghalangi praktik tata kelola keuangan desa yang partisipatif, dan (3) merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoritis, studi ini melengkapi kajian manajemen publik desa dengan menambah sudut pandang etnografi masyarakat sebagai aktor utama. Secara praktis, penelitian menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis partisipasi warga, termasuk rekomendasi pembentukan forum warga dan publikasi laporan keuangan secara berkala, yang dapat membantu pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal memperbaiki tata kelola keuangan desa.

2. Kajian Pustaka

Landasan teoritis dalam penelitian ini mengacu pada tiga tingkat teori yang saling melengkapi: grand theory, middle-range theory, dan applied theory. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara holistik praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta bagaimana nilai sosial budaya lokal membentuk persepsi dan partisipasi masyarakat.

Sebagai grand theory, penelitian ini menggunakan konsep Good Governance dari UNDP yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan Desa Nangerang telah memenuhi standar tata kelola yang baik. Namun demikian, dalam implementasinya, prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk kontrol sosial masyarakat yang aktif. Seperti dikemukakan oleh (Kumorotomo, 2010, dalam Meilani Fitrianti, 2024), keterlibatan warga desa dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran merupakan indikator utama dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai middle-range theory, digunakan teori akuntabilitas publik dari Bovens yang menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pertanggungjawaban antara pemerintah dan publik. Di Desa Nangerang, mekanisme pertanggungjawaban masih terbatas pada pelaporan administratif kepada pemerintah kabupaten tanpa melibatkan audit sosial dari warga. Hal ini sejalan dengan temuan (Syawaluddin Syawaluddin dkk., 2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya membutuhkan pelaporan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam menilai dan memahami informasi tersebut.

Selain itu, teori partisipasi masyarakat dari Arnstein (1969) digunakan untuk menjelaskan bentuk keterlibatan masyarakat yang cenderung berada pada tingkat "tokenisme", yaitu partisipasi semu yang tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan anggaran. Meski musyawarah desa dilakukan secara rutin, namun hasilnya tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Sebagai applied theory, pendekatan etnografi komunikasi dari Spradley digunakan untuk memahami pola komunikasi masyarakat Desa Nangerang dalam menyampaikan kritik dan menyikapi informasi publik. Nilai budaya seperti legowo, gotong royong, dan penghormatan terhadap otoritas menyebabkan warga cenderung menghindari kritik terbuka dan memilih menyampaikan keluhan melalui jalur informal atau melalui tokoh adat. Selain itu, konsep budaya lokal dari Geertz juga digunakan untuk menganalisis bagaimana kearifan lokal yang membentuk kepercayaan sosial (social trust) justru berpotensi menghambat terwujudnya kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini juga merujuk pada beberapa studi terdahulu yang relevan. (Rismayadi, 2019) menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik di tingkat kecamatan masih lemah akibat kurangnya ketelitian dalam pelaporan dan minimnya keterbukaan informasi. Sementara itu, studi oleh (Khoiriah & Meylina, 2018) mengungkap bahwa meskipun kerangka regulasi pengelolaan dana desa sudah

komprehensif, namun pada praktiknya masih ditemukan celah dalam implementasi yang mengakibatkan lemahnya kontrol sosial dan akuntabilitas publik. Penelitian dari (Novitasari & Iswara, 2024) yang dilakukan di Desa Pepelegi menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan baik bila didukung oleh pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi etnografi. Etnografi dipilih sebagai metode karena mampu menggambarkan dan memahami perilaku, praktik, serta pandangan masyarakat dalam konteks budaya lokal yang menjadi latar dari pengelolaan keuangan desa. Desa Nangerang dipilih secara purposif karena selain memiliki jumlah dana desa yang besar, desa ini juga memiliki struktur sosial dan nilai budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakatnya.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tiga kelompok besar: pemerintah desa (kepala desa, sekretaris, bendahara), tokoh masyarakat (RT/RW, tokoh agama), dan kelompok masyarakat (petani, pedagang, pemuda, ibu rumah tangga). Instrumen wawancara disusun berdasarkan tema-tema pokok dalam rumusan masalah dan bersifat terbuka, sehingga memungkinkan informan untuk mengembangkan pandangannya secara bebas.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan mengelompokkan informasi ke dalam tema utama seperti persepsi masyarakat, nilai budaya, dan kesenjangan kebijakan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi etnografis dan interpretatif, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada triangulasi sumber dan konteks.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Nangerang sebagian besar berjalan dalam kerangka formalitas prosedural. Pemerintah desa telah menjalankan kewajiban administratif seperti menyusun APBDes, menyampaikan laporan, dan memasang papan informasi. Namun, pelaksanaan transparansi tersebut belum secara langsung menjangkau pemahaman warga. Banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses atau membaca informasi keuangan yang disajikan secara teknis dan penuh istilah formal. Bagi sebagian warga, angka-angka dalam laporan keuangan tidak memiliki

makna substantif karena tidak diterjemahkan dalam bahasa dan konteks yang mereka pahami.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa juga masih bersifat simbolik. Meski dilibatkan dalam musyawarah desa, suara masyarakat tidak selalu menentukan arah kebijakan atau prioritas anggaran. Masyarakat cenderung bersikap pasif, menyerahkan keputusan kepada pihak desa tanpa banyak bertanya atau mengkritik. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai budaya lokal yang menekankan pada rasa hormat, ketundukan terhadap pemimpin, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Budaya legowo dan gotong royong justru membuat masyarakat enggan mempertanyakan penggunaan dana, karena khawatir dianggap tidak sopan atau tidak menghormati aparat desa.

Dalam perspektif komunikasi, masyarakat Desa Nangerang cenderung menggunakan pendekatan tidak langsung dalam menyampaikan ketidakpuasan. Kritik biasanya disampaikan melalui tokoh agama atau adat secara tersirat, bukan secara terbuka. Pola komunikasi seperti ini, sebagaimana dijelaskan oleh Spradley dalam teori etnografi komunikasi, merupakan bagian dari struktur budaya yang sangat memengaruhi relasi antara warga dan pemerintah desa. Akibatnya, meskipun terdapat ruang partisipasi secara formal, kontrol sosial masyarakat terhadap dana publik tidak berjalan secara efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pengelolaan keuangan desa. Banyak warga berharap agar pembangunan dilakukan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, karena keterbatasan dana dan kapasitas teknis aparatur desa, tidak semua aspirasi masyarakat dapat terealisasi. Hal ini menimbulkan rasa kecewa, namun tidak selalu disuarakan secara terbuka, melainkan disikapi dengan sikap pasrah atau legowo.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Nangerang masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance dalam arti yang substantif. Mekanisme yang ada lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif dan prosedural, sementara keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tingkat simbolik. Nilai-nilai sosial budaya lokal seperti legowo, gotong royong, dan sikap menghormati otoritas telah membentuk pola relasi yang harmonis namun juga menghambat pengawasan sosial yang kritis dan aktif..

5. Daftar Pustaka

- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Meilani Fitrianti, V. F. S. (2024). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance*. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA PEPELEGI)*. 13.
- Rismayadi, D. (2019). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN*.
- Syawaluddin Syawaluddin, Afrah Junita, & Iqlima Azhar. (2022). SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW: PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN, TEMUAN INSPEKTORAT DAN SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 153–162. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.644>